



MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 17/M/1/2015

Jakarta, 22 Januari 2015

Lamp. : Daftar LPTK Penyelenggara PPG

Hal : Legalitas Sertifikat Pendidik Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Nasional
4. Gubernur / Kepala Daerah Tingkat I
5. Bupati/Walikota
6. Kepala Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Kebudayaan
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten

Pasal 8 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 menyatakan bahwa seorang calon pendidik harus berkualifikasi akademik **sarjana** dan memiliki **sertifikat pendidik** yang diperoleh melalui pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sejak tahun 2007 telah menyelenggarakan pendidikan profesi guru prajabatan, antara lain (1) Program Sertifikasi Guru Melalui Jalur Pendidikan, (2) Program Pendidikan Profesi Guru Pasca S-1 PGSD Berasrama dan Basic Science Berasrama, dan sejak tahun 2011 dilanjutkan dengan (3) Program Pendidikan Profesi Guru melalui Program Sarjana Mendidik di Daerah 3T (SM-3T), (4) Program Pendidikan Profesi Guru SMK Kolaboratif, serta (5) Program Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi (PPGT).

Program-program tersebut diselenggarakan di sejumlah LPTK (daftar terlampir) serta telah menghasilkan sejumlah lulusan yang berhak menyandang gelar sebagai guru profesional dan memperoleh Sertifikat Pendidik.

Pada Pasal 12 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 dinyatakan bahwa setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu. Oleh karena itu pemegang sertifikat pendidik baik yang diperoleh melalui PPG Prajabatan maupun PPG Dalam Jabatan, memiliki legalitas yang sama sebagai persyaratan untuk mendapatkan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), Nomor Registrasi Guru (NRG) serta tunjangan profesi.

Demikian untuk menjadikan perhatian bersama dalam proses penerimaan calon guru dan pengadministrasian selanjutnya.

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi,



Mohamad Nasir

NIP 196006271990011001

**DAFTAR PERGURUAN TINGGI
PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU PRAJABATAN**

NO	NAMA LPTK	NAMA PROGRAM					
		Sertifikasi Guru melalui Jalur Pendidikan	PPG SI Berasrama	PPG SI Basic Science Berasrama	PPG SM-3T	PPG SMK Kolaboratif	PPG Terintegrasi
1	Univ. Negeri Medan	√	√	-	√	√	-
2	Univ. Negeri Padang	√	√	√	√	√	√
3	Univ. Negeri Jakarta	√	√	-	√	√	√
4	Univ. Pendidikan Indonesia	√	√	√	√	√	√
5	Univ. Negeri Semarang	√	-	-	√	√	√
6	Univ. Negeri Yogyakarta	√	√	√	√	√	√
7	Univ. Negeri Surabaya	√	√	-	√	√	√
8	Univ. Negeri Malang	√	√	√	√	√	√
9	Univ. Negeri Makassar	√	√	√	√	√	√
10	Univ. Negeri Manado	√	√	√	√	√	√
11	Univ. Negeri Gorontalo	√	-	-	√	-	-
12	Univ. Pendidikan Ganesha	√	-	-	√	√	-
13	Univ. Syiah Kuala	√	-	-	√	-	-
14	Univ. Bengkulu	√	√	-	-	-	√
15	Univ. Riau	√	-	-	-	-	-
16	Univ. Sriwijaya	√	√	-	-	-	-
17	Univ. Jambi	√	-	-	-	-	-
18	Univ. Lampung	√	-	-	-	-	-
19	Univ. Sebelas Maret	√	-	-	-	√	√
20	Univ. Jember	√	√	-	-	-	-
21	Univ. Nusa Cendana	√	-	-	√	-	-
22	Univ. Mataram	√	-	-	-	-	-
23	Univ. Pontianak	√	-	-	-	-	-
24	Univ. Palangkaraya	√	√	-	-	-	-
25	Univ. Lambung Mangkurat	√	√	-	-	-	-
26	Univ. Mulawarman	√	-	-	-	-	-
27	Univ. Tadulako	√	-	-	-	-	-
28	Univ. Haluoleo	√	-	-	-	-	-
29	Univ. Pattimura	√	-	-	-	-	-
30	Univ. Cenderawasih	√	√	-	-	-	-
31	Univ. Muh. Prof. Dr. Hamka	√	-	-	-	-	-
32	Univ. Katolik Atmajaya Jakarta	√	-	-	-	-	-
33	Univ. Sanata Dharma Yogyakarta	√	-	-	-	-	√
34	Univ. Muh. Surakarta	√	-	-	-	-	-

**PENDIDIKAN PROFESI GURU PRAJABATAN
YANG TELAH/SEDANG DISELENGGARAKAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

NO	PROGRAM	DASAR HUKUM	TAHUN PENYELENGGARA	JUMLAH LULUSAN	LPTK PENYELENGGAR
1	Sertifikasi Guru melalui Jalur Pendidikan	Kep Mendiknas Nomor 122/P/2007	2007-2008	664	27
		Kep Mendiknas Nomor 122/P/2007	2008-2009	816	23
2	PPG S1 PGSD Berasrama	Kep Mendiknas Nomor 018/P/2009	2009-2012	538	11
		Kep Mendiknas Nomor 018/P/2009		284	9
		Kep Mendiknas Nomor 042/P/2010		878	12
		Kep Mendiknas Nomor 042/P/2010		1120	15
		Kep Mendiknas Nomor 041/P/2010		275	6
		Kep Mendiknas Nomor 041/P/2010		357	6
4	PPG SM-3T	Kep Dirjen Dikti Nomor 17g/DIKTI/Kep/2013	2013 - sekarang	4974	14
5	PPG SMK Kolaboratif	Kep Dirjen Dikti Nomor 67a/DIKTI/Kep/2012	2012 - sekarang	391	12
		Kep Dirjen Dikti Nomor 17g/DIKTI/Kep/2013	2013 - sekarang	500	12
6	PPG Terintegrasi	Kep Dirjen Dikti Nomor 69/DIKTI/Kep/2011	2011 - sekarang	belum ada	10
		Kep Dirjen Dikti Nomor 69/DIKTI/Kep/2011	2012 - sekarang	belum ada	10
		Kep Dirjen Dikti Nomor 17g/DIKTI/Kep/2013	2013 - sekarang	belum ada	10